



HALAMAN JUDUL
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
PELAKSANAAN PP NOMOR : 19 TAHUN 2021 TENTANG
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN GUNA
KEPENTINGAN UMUM
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Fadira Endriyani

201003742018279

SEMARANG

TAHUN 2023/2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1975 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM


PELAKSANAAN PP NOMOR : 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN GUNA KEPENTINGAN UMUM

SKRIPSI

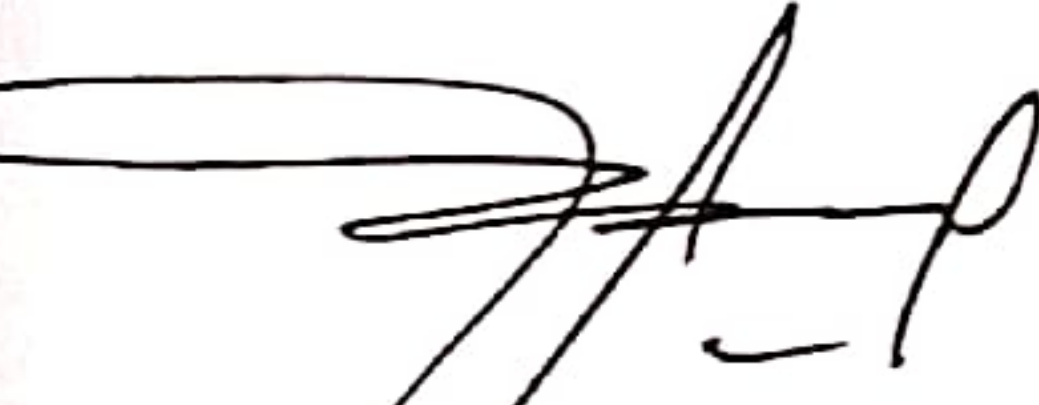
Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Fadira Endriyani
201003742018279


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Dr. Suroto, SH.MHUM
NIDN 0603045901

Anggota


Sognarto, SH.,MHUM
NIDN 0614046101

Anggota


Sri Wulandari, S.H.,M.Hum.,M.Kn.
NIDN 0630126501

Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. Edy Indivono, SH.MHUM
NIDN 0625046301
SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
Abstrak	x
BAB I	10
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Uraian Skripsi	8
BAB II	10
DAFTAR PUSTAKA	10
A. Tanah	10
B. Pengadaan Tanah	15
C. Kepentingan Umum	19
D. Ganti Rugi	21
E. Pelepasan Tanah	24
F. Pencabutan Tanah	26
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
A. Metode Pendekatan	29
B. Spesifikasi Penelitian	29
C. Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	30
F. Metode Analisa Data	30

BAB IV	32
HASIL PENELITIAN & ANALISIS DATA	32
A. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemeritah Dacrah dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 202.....	32
B. Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan guna Kepentingan Umum berdasarkan PP 19 tahun 2021.....	38
C. Hambatan yang terjadi pada saat diadakannya pengadaan tanah bagi pembangunan guna kepentingan umum.....	51
PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui dan memahami bentuk kewenangan Pemerintah dalam menghadapi proses pengadaan tanah dengan menggunakan dasar mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan guna kepentingan umum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah, serta menganalisa hambatan yang terjadi ketika dilaksanakan proses pengadaan tanah guna kepentingan umum ketika secara teoritis imbalan harus diberikan secara patut dan adil. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pada perundang-undangan dan pendekatan pada konseptual. Pembangunan merupakan salah satu upaya untuk wujudkan kesejahteraan umum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 disebutkan bahwa Gubernur selaku kepala daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam proses persiapan pengadaan tanah guna kepentingan umum setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah, kemudian tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah haruslah sesuai dengan mekanisme tahapan kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil dan apabila terjadi hambatan pemerintah berkewajiban melakukan musyawarah pemberian ganti kerugian serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, kesepakatan dan keberlanjutan.

Kata kunci : Pengadaan Tanah, Pembangunan, Kepentingan Umum.